

Volume 7. Nomor 2 Oktober 2017

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr.Hermawan M.Si – FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr.Lely Indah Mindarti M.Si –FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Dr.Diana Hertati. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dr. Agus Widiyarta. M.Si
Dra. Sri Wibawani. M.Si

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 7. Nomor 2 Oktober 2017

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahNya, hingga Oktober 2017 ini Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE Progdil Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 7 Nomor 2. Penerbitan Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, Oktober 2017

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 7. Nomor 2 Oktober 2017

DAFTAR ISI

1. Analisis Akuntabilitas Pemberian Informasi Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Dalam Pelayanan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu
Cahyo Sasmito 119
2. Tingkat Kepatuhan UPN “Veteran” Jawa Timur Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Tukiman, Ertien Rining Nawangsari, Budi Prabowo 130
3. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011
Puspita Kusumasari Williyanto, Sri Wibawani 148
4. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas
Arimurti Kriswibowo, Bambang Tri Harsanto, Denok Kurniasih 157
5. Penggunaan Media Sosial Dalam Membangun Komunitas Bisnis Tangan Di Atas (TDA) Even Organizer Di Surabaya
Saifuddin Zuhri 170
6. Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Sidoarjo
Tria Adhinta Indra Jayusman, Agus Widiyarta 178
7. Meretas Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Computer Based Test
Diana Hertati..... 184
8. Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
**Muhammad Farid Ma’ruf, Badrudin Kurniawan,
Rizky Purna Aji Galih Pangestu 192**
9. Model Alternatif Pengukuran Kinerja Aparatur Di Era Otonomi Daerah
Susi Hardjati 203

MERETAS KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL BERBASIS *COMPUTER BASED TEST*

Diana Hertati

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: Dianahertati.DH@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer memiliki banyak keunggulan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya adalah adanya beberapa fenomena yang sangat signifikan dalam transisi pelaksanaan ujian nasional di tahun pertama. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Metode dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kepustakaan dengan melakukan analisis dari beberapa karya ilmiah dan referensi terkait, sehingga dapat ditarik suatu simpulan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa ujian nasional berbasis komputer secara kontinyu dilakukan sekalipun masih perlu perbaikan, sebab ujian nasional berbasis komputer adalah merupakan standar ukuran kualitas pendidikan Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, implementasi, ujian nasional berbasis komputer

PENDAHULUAN

Dalam Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrument yang startegis untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sebagai investasi masa depan bangsa (UU No. 20 Tahun 2003). Dengan demikian pendidikan itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan pelaksanaan ujian nasional diterapkan pada tahun 2014/2015 dengan metode sebagai berikut : Pertama, ujian nasional dilaksanakan dengan mekanisme berbasis tertulis atau *Paper Based Test, PBT*. Kedua, ujian nasional dapat dilaksanakan dengan mekanisme berbasis komputer atau

yang dikenal paper *Computer Based Test, CBT*.

Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada aspek teknis dalam pelaksanaan, yang meliputi penggandaan dan pendistribusian soal ujian nasional oleh pemerintah dan pengerjaan soal ujian nasional oleh siswa, dan kedua pelaksanaan ujian nasional tersebut diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) sebagaimana tercantum pada peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang penyelenggaraan Ujian Nasional 2014/2015.

Ada beberapa sekolah jenjang pendidikan menengah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, namun sekolah yang paling siap dari segi infrastruktur adalah SMPN I Sidoarjo dengan jumlah siswa 367

siswa. Selain berkompetisi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan serta sebagai bukti sekolah terbaik di Sidoarjo, alasan SMP Negeri 1 Sidoarjo melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa predikat salah satu sekolah favorit di Sidoarjo layak diberikan (Sumber : Riset Ula, Tahun 2016).

Berdasarkan deskripsi tersebut diatas Kebijakan ujian nasional berbasis komputer sebagai terobosan baru dalam mengevaluasi hasil belajar melalui ujian nasional yang tidak hanya mengukur hasil belajar siswa tetapi juga mengukur Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) masih mengalamai beberapa masalah diantaranya adalah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan bahwa :

“perubahan mendasar Ujian Nasional terletak pada tujuannya yang bukan lagi menjadi syarat kelulusan siswa. Ujian Nasional yang sebelumnya menjadi syarat kelulusan siswa menimbulkan kecurangan yang bersifat jamak dan perlu diubah. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan kebijakan Ujian Nasional.” (<http://www.cnn-indonesia.com/nasional/20150415164000-20-46873/menteri-anies-masih-ada-masalah-pelaksanaan-ujian-nasional>)

Kemudian masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, seperti yang dikemukakan Sujono dikutip Ula, Tahun 2016 :

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau *Computer Based Test, CBT* yang kali pertama dilakukan di Sidoarjo, sempat mengalami kendala yang diduga server program UN CBT error atau ngadat. Seperti yang terpantau di UN *CBT* SMAN 1 Sidoarjo”. (Sumber Sidoarjo news.com, dikutip Ula senin, 4 April 2016)

IIUN adalah Indeks ini untuk mengukur tingkat kecurangan dalam melaksanakan ujian nasional. Hal ini penting mengingat selama ini isu kecurangan dalam ujian nasional selalu muncul.

Berdasarkan deskripsi seperti tersebut diatas, maka focus tulisan ini adalah ingin mendeskripsikan bagai-mana meretas pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindak-an” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

kemudian Lemieux sebagaimana dikutip oleh Wahab (2012:15) kebijakan publik merupakan produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya

terstruktur. Dengan demikian arti kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di laksanakan dalam mencapai tujuan.

2. Definisi Pendidikan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bertrand Russell (2002: 30) menyatakan bahwa ciri pendidikan ada pada nilai-nilai kejujuran dan keberanian. Seperti tertuang dalam pernyataannya: Pendidikan dimaksudkan supaya manusia mencerminkan lingkungannya dengan tepat lewat pengetahuannya yang diperoleh dengan kecerdasan supaya ia melibatkan diri secara emosional dengan cinta, keramahan, dan keadilan pada sesama. Akhirnya, supaya ia mengembangkan kehendak dan kemampuannya untuk proyek-proyek kemanusiaan dan tidak mengalami kendala chauvinisme sempit. Untuk itu menurut Russell, perlu diciptakan sistem pendidikan yang bebas dari represi.

Hal senada diungkapkan oleh Schumacher dikutip Mulyatiningsih (2012: 34) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha penyebaran nilai-nilai kehidupan sehingga pendidikan harus dapat memberikan

kemampuan hidup dan menginterpretasikan dunia.

Berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

3. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dikutip Wahab (2001:68) implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn dikutip Agostino, (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut : 1) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, 2) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 3) adanya hasil kegiatan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa implementasi adalah penerapan-penerapan suatu kebijakan baru yang telah dirancang untuk memberikan suatu inovasi pada pelaksanaan praktisnya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif untuk pengembangan person ataupun instansi setelah mengaplikasi-kannya.

Pada proses implementasi ujian nasional berbasis komputer memiliki unsur atau komponen yang berkaitan dengan unsur manajemen khususnya pada manajemen pendidikan yaitu mengenai kebijakan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia dan manajemen kurikulum. Oleh karena itu proses Manajemen Pendidikan sangat dibutuhkan dalam mengimple-mentasikan ujian nasional berbasis kompute.

4. Ujian Nasional Berbasis Komputer

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional, didalam pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa pada tahun pelajaran 2014/2015 terdapat kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional, yaitu bahwa ujian nasional dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara. Pertama, ujian nasional dilaksanakan dengan mekanisme berbasis tertulis atau *Paper Based Test, PBT*. Kedua, ujian nasional dapat dilaksanakan dengan mekanisme berbasis komputer atau *Computer Based Test, CBT*. Perbedaan kedua metode pelaksanaan ujian nasional tersebut

terletak pada aspek teknis dalam pelaksanaan, yang meliputi penggandaan dan pendistribusian soal ujian nasional oleh pemerintah dan pengerjaan soal ujian nasional oleh siswa, dan kedua pelaksanaan ujian nasional tersebut diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS), sebagaimana tercantum pada peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional 2014/2015.

Berdasarkan peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0032/P/BSNP/III/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (*Computer Based Test, CBT*) tahun pelajaran 2014/2015, dan Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 024/H/EP/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 017/H/EP/-2015 tentang penetapan satuan pendidikan penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Konsep Evaluasi Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat bahwa ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Salah satu bentuk evaluasi peserta didik yang diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Setiap tahun Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan pada beberapa mata pelajaran tertentu. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pendidikan maupun penempatan pada jenjang pendidikan berikutnya.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

dalam pasal 67, 68, 69 dan 72 yang menjelaskan Ujian Nasional sebagai salah satu syarat kelulusan dihapus. Penggunaan hasil Ujian Nasional tahun 2014 berbeda dengan hasil Ujian Nasional tahun 2015. Hasil Ujian Nasional 2014 menjadi standar dan patokan kelulusan. Sementara pada tahun 2015 pemanfaatan Ujian Nasional tidak lagi berpengaruh terhadap kelulusan peserta didik. Ujian Nasional sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi negara untuk pemetaan pendidikan.

Metode Penelitian

Penyusunan materi dalam tulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan melakukan analisis dari beberapa karya ilmiah dan referensi terkait, sehingga dapat ditarik suatu simpulan yang merupakan hasil dari analisis dan sintesis.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan rangkaian proses perkembangan dalam rangka pemberdayaan kompetensi dan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berkualitas yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas. Manusia yang berkualitas secara nasional berimplikasi bahwa manusia harus di bangun di atas landasan idealogi bangsa dan negara. Landasan filosofis tersebut mengandung bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan sikap nasionalisme bangsa.

Untuk mencapai cita-cita tersebut lembaga pendidikan berjuang untuk merealisasi nilai-nilai pendidikan dengan membenahi

persoalan pendidikan melalui beberapa upaya perubahan kurikulum, strategi pembelajaran, mutu pendidikan serta, muatan-nilai moral yang terus menerus diperjuangkan. Diakui atau tidak bahwa kekhawatiran saat ini sebenarnya pada masalah daya saing bangsa dari sisi intelektualitasnya dan yang lebih memprihatinkan adalah mengenai moral bangsa.

Dalam skala nasional moral bangsa kita sudah mengalami penurunan yang sangat drastis, baik moral individual, moral sosial dalam skala lokal maupun moral secara nasional. Indikator sebagai bukti banyaknya kecurangan, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya.

Para tokoh pendidikan telah mengingatkan dan memberi contoh teladan bahwa landasar moral adalah sangat penting dan merupakan fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya, dan tidak hanya pada intelektualnya saja, sebab kalau hanya intelektual akan melahirkan generasi yang melenceng dari nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Untuk merealisasikan amanah tersebut kedua-keduanya harus berjalan ber-sama-sama membangun kepribadian manusia Indonesia yang cerdas dan bermoral serta terampil. Amanah ini perlu adanya evaluasi akhir keberhasilan pendidikan nasional maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan uji keberhasilan tersebut dalam bentuk ujian nasional berbasis komputer (*Computer Based Test*).

Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan ujian nasional secara teknis adalah mempersiapkan sistem ujian nasional berbasis komputer

pada komputer server lokal sekolah dan *penyettingan* komputer *client* atau peserta yang dilakukan oleh Proktor dan Teknisi. Persiapan disini adalah berkaitan dengan proses pengaktifan komputer server lokal sekolah pada server pusat dan melakukan proses sinkronisasi secara online dan menyiapkan komputer *client* atau peserta yang digunakan pada ruang ujian.

Pada saat pelaksanaan ujian diharapkan proktor maupun teknisi dapat mengatasi problematika ujian nasional berbasis komputer yang muncul saat berlangsungnya ujian nasional. Adapun kemampuan proktor dan teknisi menghadapi problem saat berlangsungnya ujian nasional berbasis komputer telah didapatkannya saat mengikuti pelatihan secara teoritis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Sedangkan untuk siswa dibutuhkan persiapan mental, agar tetap tenang dalam mengerjakan soal maupun ketika menghadapi kendala teknis, karena ada proktor dan teknisi yang menangani masalah tersebut. Sehingga seminimal mungkin tidak mengganggu berjalannya ujian nasional berbasis komputer. Persiapan siswa yang telah diberikan pihak sekolah saat simulasi sangat membantu siswa menyiapkan diri dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

Berdasarkan sumber dari beberapa hasil riset dan literatur yang terkait menunjukkan bahwa dalam persiapan sumber daya manusia (proktor, teknisi, dan siswa) yang dilaksanakan dengan berbasis komputer di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia sudah terencana

dan terlaksana dengan baik, namun masih ada juga yang belum terimplementasi.

ujian nasional berbasis computer secara kontinyu dilakukan sekalipun masih perlu perbaikan, sebab ujian nasional berbasis adalah merupakan standar ukuran kualitas pendidikan Indonesia Sesuai dengan fokus penelitian pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang meliputi persiapan teknis dan persiapan proktor, teknisi dan siswa.

Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan secara teknis adalah mempersiapkan sistem ujian nasional berbasis komputer pada komputer server lokal sekolah dan *penyettingan* komputer *client* atau peserta yang dilakukan oleh Proktor dan Teknisi. Persiapan disini adalah berkaitan dengan proses pengaktifan komputer server lokal sekolah pada server pusat dan melakukan proses sinkronisasi secara online dan menyiapkan komputer *client* atau peserta yang digunakan pada ruang ujian.

Pada saat pelaksanaan ujian diharapkan proktor maupun teknisi dapat mengatasi problematika ujian nasional berbasis komputer yang muncul saat berlangsungnya ujian nasional. Adapun kemampuan proktor dan teknisi menghadapi problem saat berlangsungnya ujian nasional berbasis komputer telah didapatkannya saat mengikuti pelatihan secara teoritis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Sedangkan untuk siswa dibutuhkan persiapan mental, agar tetap tenang dalam mengerjakan soal maupun ketika menghadapi kendala teknis, karena ada proktor dan teknisi

yang menangani masalah tersebut. Sehingga seminimal mungkin tidak mengganggu berjalannya ujian nasional berbasis komputer. Persiapan siswa yang telah diberikan pihak sekolah saat simulasi sangat membantu siswa meyiapkan diri dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

Kesimpulan

Model evaluasi yang dilakukan oleh Departemen pendidikan Nasional melibatkan tiga aspek yang masing-masing komponen harus dipertimbangkan. Sangat tepat kalau ujian nasional berbasis computer secara kontinyu dilakukan sekalipun masih perlu perbaikan, sebab ujian nasional berbasis adalah merupakan standar ukuran kualitas pendidikan Indonesia. Hasil belajar satuan pendidikan bukan merupakan ukuran menyeluruh terkait dengan kemampuan rata-rata nasional. Satuan pendidikan merupakan cerminan kemampuan tujuan institusi pendidikan dalam skala sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan ada yang bersifat tujuan pembelajaran spesifik pada mata pelajaran atau bidang studi tertentu, ada tujuan institusional kelembagaan, dan tujuan yang bersifat nasional. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model* Van Meter Van Horn: The

- Policy.
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Dadang Suhardan. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Didin Kurniadin dan Imam Machali. 2013. *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djemari Mardapi. 2012. *Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mulyatiningsih, Endang. 2012. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan* Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerin-tah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah-/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kese-taraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
- Hasil Riset Ula Maziidatil Sa’adatul. 2016. Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (*Computer Based Test, Cbt*) Di Smp Negeri 1 Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.